



# **Masalah Kebangsaan**

## **Pertemuan 12, 13**

## Sub-CPMK

Mahasiswa mampu menunjukkan masalah-masalah kebangsaan yang sedang dihadapi, seperti rendahnya kesadaran perpajakan, masalah korupsi, dan radikalisme/anarkisme/tawuran. (A3)

## **Materi:**

1. Rendahnya Kesadaran Pajak.
2. Korupsi (Pengertian, Bentuk, Penyebab, dampak Korupsi)
3. Radikalisme/Anarkisme/Tawuran.
4. Narkoba.



## **9.1. Rendahnya Kesadaran Pajak**

## 9.1. Rendahnya Kesadaran Pajak (Lanj ....)

### Arti Kesadaran Pajak

- ☐ Untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, sejahtera, adil, dan damai negara membutuhkan sumber pendanaan pembangunan. Data tahun 2016 menunjukkan bahwa 74,6% total penerimaan negara berasal dari sektor. Meningkatkan angka penerimaan negara dari sektor pajak dibutuhkan kesadaran perpajakan dari setiap warga negara termasuk mahasiswa.
- ☐ Kesadaran pajak setiap warga negara merupakan modal pskososial untuk menunaikan kewajiban sebagai pembayar dan juga penikmat pajak.
- ☐ Sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment*, artinya negara memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan SPT secara mandiri.
- ☐ Masyarakat Indonesia (mahasiswa) seharusnya memiliki pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan.

## 9.1. Rendahnya Kesadaran Pajak (Lanj ....)

- ☐ Pertanyaannya, dengan angka penerimaan negara dari sektir pajak ini, apakah sudah menggambarkan bahwa kesadaran pajak warga negara sudah cukup baik?
- ☐ Masih banyak wajib pajak (perorangan/badan) masih belum sadar memenuhi kewajiban pajak. Data menunjukkan bahwa baru **11 %** masyarakat Indonesia terdaftar sebagai wajib pajak, dari baru **5%** melaporkan SPT, dan **0,1%** masyarakat membayar pajak.
- ☐ Laporan belum sesuai dengan harta dan penghasilan yang sebenarnya, bahkan banyak kekayaan disembunyikan.
- ☐ Banyak warga negara belum terdaftar sebagai wajib pajak, tidak membayar pajak tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan pemerintah.
- ☐ Artinya, sektor perpajakan memiliki peran sangat penting dalam menjamin keberlangsungan bangsa, khususnya mewujudkan bangsa yang cerdas (pendidikan), sejahtera, adil, dan damai.

## 9.1. Rendahnya Kesadaran Pajak (Lanj ....)

- ☐ Masih banyak wajib pajak (perorangan/badan) masih belum sadar memenuhi kewajiban pajak.
- ☐ Laporan belum sesuai dengan harta dan penghasilan yang sebenarnya, bahkan banyak kekayaan disembunyikan.
- ☐ Banyak warga negara belum terdaftar sebagai wajib pajak, tidak membayar pajak tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan pemerintah.
- ☐ Artinya, sektor perpajakan memiliki peran sangat penting dalam menjamin keberlangsungan bangsa, khususnya mewujudkan bangsa yang cerdas (pendidikan), sejahtera, adil, dan damai.

## 9.1. Rendahnya Kesadaran Pajak (Lanj ....)

- ☐ Bagaimana menumbuhkan kesadaran sehingga masalah kesadaran perpajakan bisa meningkat? Beberapa hal sederhana untuk menumbuhkan kesadaran perpajakan (khusus mahasiswa).
- ☐ Membiasakan menghitung penghasilan per bulan (tertib & disiplin mengelola penghasilan).
- ☐ Membiasakan menghitung pengeluaran rutin per bulan (ukur kemampuan diri dalam berbelanja kebutuhan).
- ☐ Membiasakan diri menghitung kelebihan penghasilan per bulan (kemampuan menabung untuk masa depan).
- ☐ Membiasakan diri memiliki semangat berbagi (menyisihkan penghasilan untuk mereka yang kekurangan sebagai bentuk kepedulian dan semangat gotong royong lewat pajak).



## 9.2. Korupsi

## 9.2. Korupsi (Lanj .... )

- ❑ **"KORUPSI"** dari bahasa Latin **"*corruptio*"** atau **"*corruptus*"** "*corruptio*" dari kata "*corrumpere*", → "*corruption, corrupt*" (Inggris), "*corruption*" (Perancis) dan "*corruptie/korruptie*" (Belanda). **artinya:** Kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.
- ❑ Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang berlaku di masyarakat.
- ❑ Di Indonesia korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).
- ❑ Baharuddin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

## 9.2. Korupsi (Lanj .... )

### **Bentuk Korupsi:**

#### **Kerugian Keuangan Negara**

- ❑ Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi.
- ❑ Menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi → menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada.

#### **Suap Menyuap**

- ❑ Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara, ... dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.

#### **Penggelapan dalam Jabatan**

- ❑ Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya.

## 9.2. Korupsi (Lanj .... )

### **Pemerasan**

- ❑ Pegawai negeri/penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

### **Perbuatan Curang**

- ❑ Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang , atau keselamatan Negara.

## 9.2. Korupsi (Lanj .... )

### **Benturan Kepentingan dalam Pengadaan**

- ❑ Pegawai negeri/penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

### **Gratifikasi**

- ❑ Perbuatan suap yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.

## 9.2. Korupsi (Lanj .... )

### Penyebab Korupsi

- ❑ Perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta system politik yang masih mendewakan materi memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi.
- ❑ Ketergodaan akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. *"Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa dengan mudah diperoleh, maka jadilah orang melakukan korupsi"*.
- ❑ Penyebab korupsi lainnya antara lain: sifat tamak manusia; moral yang tidak kuat; gaya hidup; tidak mau bekerja keras/malas.

## 9.2. Korupsi (Lanj .... )

### **Dampak Korupsi**

#### **Ekonomi**

- ❑ Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Mempersulit pembangunan dan efisiensi ekonomi suatu Negara.
- ❑ Penurunan produktivitas yang menyebabkan PHK dan pengangguran, PHK & pengangguran menyebabkan kemiskinan masyarakat.
- ❑ Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik.
- ❑ Menurunnya pendapat Negara.
- ❑ Meningkatnya hutang Negara.

#### **Runtuhnya Otoritas Pemerintah**

- ❑ Rendahnya etika sosial politik.
- ❑ Tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan.
- ❑ Birokrasi yang tidak efisien.

## 9.2. Korupsi (Lanj .... )

### **Politik & Demokrasi**

- ☐ Kepemimpinan yang korup.
- ☐ Hilangnya kepercayaan publik kepada demokrasi.
- ☐ Menguatnya plutokrasi (politik dikuasai pemilik modal/kapitalis).
- ☐ Hancurnya kedaulatan rakyat.

### **Penegakan Hukum**

- ☐ Penegakan hukum terhambat.
- ☐ Kepercayaan publik terhadap lembaga hukum menurun/hilang.



## 9.2. Korupsi (Lanj .... )

### Hankam

- ☐ Kerawanan hankamnas.
- ☐ Lemahnya garis batas Negara.
- ☐ Timbulnya *proxy war* (perang proksi).
- ☐ Menguatnya kekerasan sosial dalam masyarakat

### Lingkungan Hidup

- ☐ Menurunnya kualitas lingkungan hidup.
- ☐ Menurunnya kualitas hidup.

## 9.2. Korupsi (Lanj .... )

### **Upaya Pemberantasan Korupsi**

- ☐ Penegakan hukum.
- ☐ Pembentukan lembaga-lembaga antikorupsi.
- ☐ Pencegahan korupsi di sektor publik.
- ☐ Pemberdayaan masyarakat.
- ☐ Pengembangan Instrumen hukum yang mendukung pencegahan & pemberantasan korupsi.
- ☐ Monitoring & Evaluasi.
- ☐ Kerjasama Internasional.



## **9.3. Radikalisme, Anarkisme, Tawuran**

## 9.3. Radikalisme, Anarkisme, Tawuran (Lanj .... )

- ❑ Dunia mengalami turbulensi.
- ❑ Lalu lintas dunia maya dan dunia nyata diwarnai atau sengaja diarahkan untuk saling membenci satu sama lain.
- ❑ Radikalisme teoritis di Indonesia menyasar ancamannya pada polisi, tentara dengan berbagai aksi radikal dan pemboman (tempat ibadah, kantor polisi, dan obyek vital lainnya, seperti tempat wisata).
- ❑ Markas besar Polri menyatakan 300 orang Indonesia bergabung dengan organisasi teroris ISIS dan pergerakannya terus meningkat.
- ❑ Gerakan radikal ini berusaha membasmi kehidupan, menebar fitnah, kebencian, dan antitoleransi.
- ❑ Kondisi ini mengganggu keamanan dan kenyataan hidup berbangsa & bernegara.

## 9.3. Radikalisme, Anarkisme, Tawuran (Lanj .... )

- ❑ Banyak sekali terjadi kasus tawuran anarkis terjadi di tanah air, yang berujung pada kerusakan, pembakaran rumah & kantor, kampus, pemblokiran jalan, dan lain-lain.
- ❑ Reformasi menuntut demokrasi tetapi tidak diimbangi oleh pemaknaan yang dalam atas demokrasi.
- ❑ Karena itu memunculkan konflik berdarah di masyarakat.
- ❑ Ralf Dahrendrof menyatakan bahwa pada masyarakat modern pilihan individu menjadi meningkat sedangkan ikatan moral dalam jaringan kewajiban sosial sudah banyak yang hilang.
- ❑ Konflik dan kekerasan menunjukkan bahwa modal sosial bangsa akan tergerus.
- ❑ *Homo homini lupus*, manusia menjadi serigala untuk sesamanya, berlawanan dengan nilai kebangsaan yang menjunjung tinggi kebersamaan, gotong royong & tepa selira, dan saling hormat menghormati.



## **9.4. Narkoba**

## 9.4. Narkoba (Lanj .... )

- ❑ Narkoba membahayakan kelangsungan hidup manusia dan memunculkan penyakit sosial (*social pathology*) bagi mereka yang menggunakannya.
- ❑ Di seluruh dunia pecandu berat narkoba berjumlah antara 15.5 - 38.6 juta, prevalensi penggunaannya sekitar 5 %.
- ❑ Data BNN sejak tahun 2015 pengguna Narkoba mencapai 5,8 juta jiwa, 1, 3 juta jiwa pecandu narkoba adalah pelajar dan mahasiswa, sedangkan yang lainnya: para artis, oknum TNI, polisi, PNS, politisi, dan masyarakat.
- ❑ Prevalensinya 2.8 %, ada kenaikan hampir dua kali lipat dalam 10 tahun terakhir (tahun 2004, prevalensinya 1.75%).
- ❑ Indonesia termasuk negara darurat narkoba (mafia, bandar, pengedar).
- ❑ Nilai transaksi narkoba mencapai 66,3 triliun per tahun.

# Ringkasan



## Ringkasan (Lanj .... )

- ❑ Nilai-nilai kebangsaan kita, baik yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, maupun yang bersumber dari Bhinneka Tunggal Ika sekarang ini sedang menghadapi ujian dan tantangan besar.
- ❑ Sekarang ini kita menyaksikan permasalahan-permasalahan bangsa justeru berhadapan langsung dengan nilai-nilai luhur yang sudah ditetapkan para pendiri bangsa dalam empat konsensus nasional ini.
- ❑ Kesadaran membayar pajak warga negara rendah, padahal pajak sumber penerimaan negara untuk kesejahteraan rakyat.
- ❑ Lalu, globalisasi menawarkan fenomena *proxi war* melalui sindroma narkoba lintas negara; terorisme dan radikalisme yang menampilkan kekerasan & pembunuhan sebagai sesuatu yang biasa; di tengah masyarakat dengan mudah tersulut konflik bernama tawuran warga; dan korupsi sudah menjadi masalah akut bagi bangsa ini.
- ❑ Kita dituntut bergerak maju untuk mengatasinya, demi tegaknya bangsa & negara di atas fundasi: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika



# TERIMA KASIH

U N I V E R S I T A S   B U N D A   M U L I A